

**PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)**

Isnani Yuli Andini
(isnaniyuliandini@gmail.com)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja

Norsain

(sain_unija@yahoo.co.id)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan PSAK No. 101 dan kesesuaian pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan konsep-konsep yang diatur dalam *syariah* Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 101 dan pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar telah sesuai dengan konsep-konsep yang diatur dalam *syariah* Islam. Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 tentang penyajian laporan keuangan *syari'ah*, tujuan ditetapkannya PSAK No. 101 adalah terciptanya penyajian laporan keuangan entitas *syari'ah* yang baku berdasarkan atas standar, sehingga dapat dipergunakan baik oleh pihak intern PT. BPRS Bhakti Sumekar maupun pihak ekstern.

Kata kunci : PSAK No. 101, Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syari'ah, Pendapatan Bagi Hasil dalam Syariah Islam.

PT. BPRS Bhakti Sumekar meraih penghargaan sebagai BPRS rating atas urutan keempat tahun 2011 versi Infobank. Penghargaan dengan predikat sangat bagus untuk BPRS Bhakti Sumekar dipublikasikan pada majalah Infobank edisi 34 khusus Syariah. PT. BPRS Bhakti Sumekar menduduki peringkat kelima dari 38 BPRS terbaik di Indonesia peraih penghargaan untuk kategori BPRS terbaik per Desember 2010-2011 beraset Rp 50 milyar ke atas. BPRS Bhakti Sumekar meraih Predikat "Sangat Bagus" dalam rating institusi keuangan syariah versi infobank dengan skor 83.62%. Semua aspek kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan positif. Laba Rugi tahun berjalan tumbuh 7.95% dari Rp7.82 milyar per Desember 2010 menjadi Rp. 8.44 milyar per Desember 2011. Dana pihak ketiga juga meningkat dari Rp. 30.72 milyar menjadi 36.16 milyar atau naik 17.71%. (www.bhaktisumekar.co.id)

Hal ini membuktikan bahwa berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar merupakan badan usaha yang efisien, efektif, dan ekonomis atas sumber dayanya yang terbatas diperlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Informasi akuntansi tersebut berupa laporan keuangan perbankan *syari'ah*. Laporan keuangan yang dibuat tersebut selain ditujukan kepada pemilik modal, juga digunakan oleh pemakai lainnya yang

mempunyai kepentingan terhadap perbankan syariah. Berkenaan dengan hal tersebut, penyajian laporan keuangan tersebut harus didasarkan pada standar akuntansi yang diatur dalam PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, agar pengungkapan dan informasi yang dihasilkan dapat lebih berguna bagi pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun suatu standar penyajian laporan keuangan syariah bagi lembaga keuangan syariah yakni PSAK No. 101 yang menjadi rujukan bagi entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan syariah.

PSAK No. 101 sebagai suatu standar yang baku dalam penyajian laporan keuangan lembaga syariah dan dilaksanakannya operasionalisasi perbankan berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan acuan yang menyediakan informasi mengenai kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Namun, keberadaan PSAK No. 101 apakah sudah dipahami ataupun dipraktekkan dalam penyajian laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena akses informasi mengenai PSAK No. 101 yang berasal dari IAI masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT. BPRS Bhakti Sumekar, Apakah penyajian laporan keuangan dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan Apakah pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan sudah sesuai dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariah Islam? Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk Mengetahui penyajian laporan keuangan pada PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk menilai kesesuaian antara penyajian laporan keuangan pada PT. Bhakti Sumekar dengan ketentuan menurut PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan mengidentifikasi kesesuaian pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariah Islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Dalam penyajian laporan keuangan, PT. BPRS Bhakti Sumekar memiliki kebijakan yang dijalankan. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penyajian dalam laporan keuangan untuk penyajian posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang layak sesuai dengan Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan, maka laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar disajikan dalam beberapa jenis laporan terdiri dari laporan bulanan ke Bank Indonesia (BI) diantaranya (laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan, laporan komitmen dan kontinjensi dan rekening administratif), laporan

struktur kelompok usaha, laporan tahunan, laporan keuangan publikasi triwulanan, laporan rencana kerja, laporan pelaksanaan kerja, laporan BMPK. Laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 tentang laporan keuangan entitas syariah.

1. Neraca

Neraca perusahaan meliputi komponen-komponen yang terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas yang disusun berdasarkan klasifikasi "pos-pos lancar dan tidak lancar". Bentuk laporan keuangan ini ditampilkan pada tabel 1.1.

B. Format Neraca

TABEL 1.1
NERACA PUBLIKASI
PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR - SUMENEP
Tanggal : 30 Juni 2012

Uraian	Jumlah
AKTIVA	
1. Kas	xxx
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	xxx
3. Giro pada Bank Lain	xxx
4. Penempatan Pada Bank Lain	xxx
5. Piutang Murabahah	xxx
6. Piutang Salam	xxx
7. Piutang Istishna	xxx
8. Pembiayaan Mudharabah	xxx
9. Pembiayaan Musyarakah	xxx
10. Ijarah	xxx
11. Qardh	xxx
12. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/-	xxx
13. Aktiva Istishna	xxx
14. Persediaan	xxx
15. Aktiva Tetap dan Inventaris	xxx
16. Akumulasi penghapusan Aktiva Tetap -/-	xxx
17. Aktiva lain-lain	xxx
Jumlah	xxx
PASIVA	
1. Kewajiban segera	xxx
2. Tabungan Wadiah	xxx
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia	xxx
4. Kewajiban Lain-lain	xxx
5. Pinjaman yang diterima	xxx
6. Pinjaman Subordinasi	xxx
7. Modal Pinjaman	xxx
8. Dana Investasi Tidak Terikat	
a. Tabungan Mudharabah	xxx
b. Deposito Mudharabah	xxx
9. Ekuitas	xxx
a. Modal Disetor	xxx
b. Tambahan Modal Disetor	xxx
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	xxx
d. Cadangan	xxx
e. Saldo Laba (Rugi)	xxx
Jumlah	xxx

Sumber : www.bhaktisumekar.co.id

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi PT. BPRS Bhakti Sumekar disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu, yang meliputi unsur-unsur pendapatan dan beban. Termasuk dalam laporan laba rugi tersebut, pendapatan

operasional, bagi hasil kepada pemilik dana, pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil, beban operasional, pendapatan non operasional, beban non operasional, zakat, taksiran pajak penghasilan sehubungan dengan kegiatan perusahaan. Bentuk laporan keuangan ini ditampilkan pada tabel 4.2.

B. Format Laporan Laba Rugi

TABEL 1.2
PERHITUNGAN LABA-RUGI PUBLIKASI
PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR-SUMENEP
Tanggal : 30 Juni 2012

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx
1. Pendapatan Operasional Dari Penyaluran Dana	xxx
a. Pendapatan dari pihak ketiga bukan bank	xxx
b. Pendapatan dari Bank Indonesia	xxx
c. Pendapatan dari bank lain	xxx
2. Pendapatan Operasional Lainnya	xxx
BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	xxx
1. Pihak ketiga bukan bank	xxx
a. Tabungan Mudharabah	xxx
b. Deposito Mudharabah	xxx
c. Lainnya	xxx
2. Bank Indonesia	xxx
3. Bank Lainnya	xxx
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	xxx
BEBAN OPERASIONAL	xxx
1. Bonus titipan wadiah	xxx
2. Beban administrasi dan umum	xxx
3. Beban personalia	xxx
4. Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif	xxx
5. Lainnya	xxx
LABA (RUGI) OPERASIONAL	xxx
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	xxx
BEBAN NON OPERASIONAL	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	xxx
ZAKAT	xxx
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	xxx
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	xxx

Sumber : www.bhaktisumekar.com

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan salah satu dari tiga laporan keuangan utama PT. BPRS Bhakti Sumekar. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran) untuk satu periode laporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan salah satu dari empat laporan keuangan utama PT. BPRS Bhakti Sumekar. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan informasi keuangan tentang perubahan ekuitas selama satu perioda. Perubahan ekuitas lazimnya terjadi karena penambahan setoran dari pemilik (modal saham) selama perioda berjalan, penambahan karena laba selama satu perioda atau pengurangan karena rugi selama satu perioda, pengurangan karena

pendistribusian ekuitas melalui pengumuman pembagian atau pendistribusian dividen. Laporan Ekuitas PT. BPRS Bhakti Sumekar ini penting terutama bagi para pemilik saham (*shareholders*) untuk melihat perkembangan modal yang telah disetorkan.

5. Laporan perubahan dana investasi terikat

Laporan Perubahan dana investasi terikat merupakan salah satu dari lima laporan keuangan utama PT. BPRS Bhakti Sumekar. PT. BPRS Bhakti Sumekar menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat yang terdiri dari investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena PT. BPRS Bhakti Sumekar tidak mempunyai untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta PT. BPRS Bhakti Sumekar tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

6. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan salah satu dari enam laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar. PT. BPRS Bhakti Sumekar menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang terdiri dari:

- a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*,
- b) Penyesuaian atas:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima
 - b. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.
- c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
- d) Bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
- e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
 - a. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana
 - b. Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

PT. BPRS Bhakti Sumekar menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

PT. BPRS Bhakti Sumekar menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

9. Catatan atas Laporan Keuangan

PT. BPRS Bhakti Sumekar menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

a) Untuk memenuhi tujuan umum dan kualitatif penyajian laporan keuangan harus dilengkapi tambahan informasi berupa catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan dasar sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Agar para pemakai laporan keuangan memperoleh perspektif yang tepat mengenai perusahaan sebagaimana diinformasikan dalam laporan keuangan, maka perlu diberikan informasi tambahan yang menerangkan faktor-faktor khusus yang mempengaruhi laporan tersebut.

b) Isi

Catatan atas laporan keuangan biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi
2. Perubahan dalam penerapan kebijakan akuntansi
3. Pengungkapan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah tanggal neraca hingga saat laporan diterbitkan
4. Pengungkapan-pengungkapan rutin lainnya
5. Penyediaan informasi non keuangan yang relevan.

Keberadaan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan syari'ah yang timbul dari hubungan transaksi antara entitas syari'ah dengan *stakeholders* dan transaksi lain yang spesifik pada entitas syariah. PSAK No. 101 dapat mengakomodasi karakteristik entitas syari'ah yang membedakannya dengan perusahaan lain melalui penyajian laporan keuangan syariah sebagai dasar informasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Karakteristik tersebut seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat dan dana kebajikan. Selain itu, adanya perbedaan dalam penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Keberadaan PSAK No. 101 diharapkan dalam menyajikan laporan keuangannya, PT. BPRS Bhakti Sumekar dapat menghasilkan informasi yang lebih berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut. Pengguna laporan keuangan selain pemilik modal PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah *stakeholders*. Ikatan Akuntan Indonesia telah menyarankan penyajian laporan keuangan syariah untuk entitas syari'ah agar sesuai dengan PSAK No. 101 dengan tujuan informasi yang disajikan lebih lengkap.

Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri atas: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap jenis entitas syariah dapat menambahkan komponen laporan keuangan lain, selain komponen laporan keuangan di atas. Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 dibahas sebagai berikut:

1. Neraca

Laporan neraca berdasarkan PSAK No. 101 meliputi komponen-komponen yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Bentuk laporan keuangan neraca ditampilkan pada tabel 1.3.

TABEL 13
PT. BANK SYARIAH "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 20X1

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
ASET		KEWAJIBAN	
Kas	xxx	Kewajiban segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Giro pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan dari bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx	Utang:	
Piutang:		<i>Salam</i>	xxx
<i>Murabahah</i>	xxx	<i>Istishna'</i>	xxx
<i>Salam</i>	xxx	Jumlah utang	xxx
<i>Istishna</i>	xxx	Kewajiban kepada bank lain	xxx
<i>Ijarah</i>	xxx	Pembiayaan yang diterima	xxx
Jumlah piutang	xxx	Utang pajak	xxx
Pembiayaan:		Estimasi kerugian komitmen dan	
<i>Mudharabah</i>	xxx	kontinjensi	xxx
<i>Musarakah</i>	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Jumlah pembiayaan	xxx	Kewajiban lainnya	xxx
		Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Aset <i>ijarah</i>	xxx	Dana <i>syirkah</i> temporer dari bukan bank:	
Aset <i>istishna</i> dalam penyelesaian	xxx	Tabungan <i>mudharabah</i>	
Penyertaan pada entitas lain	xxx	Deposito <i>mudharabah</i>	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer bukan	xxx
Aset lainnya	xxx	bank	
Jumlah Aset	xxx	<i>Musarakah</i>	xxx
	xxx	Jumlah Dana Syirkah Temporer	xxx
		EKUITAS	xxx
		Modal disetor	
		Tambahan modal disetor	
		Saldo laba (rugi)	xxx
		Jumlah Ekuitas	xxx
		Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah	xxx
		Temporer, Dan Ekuitas	xxx
			xxx

Sumber : Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK No.101

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi dalam PSAK No.101 disusun mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait. Laporan laba rugi entitas syaria'ah minimal mencakup pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban nonusaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban

pajak dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Bentuk laporan keuangan ini ditampilkan pada tabel 1.4.

TABEL 1.4
PT. BANK SYARI'AH "X"
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 20X1

Uraian	Jumlah
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	xxx
Pendapatan bersih <i>salam</i> paralel	xxx
Pendapatan bersih <i>istishna</i> paralel	xxx
Jumlah pendapatan dari jual beli	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx
Jumlah pendapatan dari bagi hasil	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
<i>Hak bagi hasil milik Bank</i>	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	xxx
Beban administrasi	xxx
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx
Beban usaha lain	xxx
Jumlah Beban Usaha	xxx
<i>Laba (Rugi) Usaha</i>	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	xxx
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	xxx
<i>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</i>	xxx
Beban Pajak	xxx
Laba (Rugi) Netto Periode Berjalan	xxx

Sumber : Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah PSAK No.101

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAK No. 101 menggambarkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, setiap pos pendapatan dan beban, keuangan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Dan gambaran pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Dan transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Bentuk laporan keuangan ini tidak ditampilkan pada PSAK No. 101.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 101 disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan saldo awal dana investasi terikat, jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode, dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan, penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode laporan, keuntungan atau kerugian dana investasi terikat, imbalan bank syariah sebagai agen investasi, beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat, saldo akhir dana investasi terikat, dan jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode. Bentuk laporan keuangan ini ditampilkan pada tabel 1.5.

TABEL 1.5
PT. BANK SYARIAH "X"
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20X1

Uraian	Jumlah
Saldo awal	xxx
Jumlah init penyertaan investasi awal periode Nilai per	xxx
unit penyertaan investasi	xxx
Penerimaan dana	xxx
Penarikan dana	(xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi	xxx
Biaya administrasi	(xxx)
Imbalan bank sebagai agen investasi	(xxx)
Saldo investasi pada akhir periode	xxx
<i>Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode</i>	xxx
<i>Nilai unit penyertaan investasi pada akhir periode</i>	xxx

Sumber : *Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah PSAK No.101*

6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, penyesuaian atas (i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian pemilik dana atass pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil (i) bagi hasil yang sudah didistribusikan ke

pemilik dana (ii) bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Bentuk laporan keuangan ini ditampilkan pada tabel 1.6.

TABEL 1.6
PT. BANK SYARIAH "X"
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20X1

Uraian	Jumlah
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	xxx
Pengurang :	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	(xxx)
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna'	(xxx)
Hak bagi hasil:	(xxx)
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah pengurang	
Penambah:	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin murabahah	
Istishna'	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	xxx
Pembiayaan mudharabah	
Pembiayaan musyarakah	
Jumlah penambah	xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	
<i>Dirinci atas:</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>	xxx
	xxx

Sumber : Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK No.101

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

TABEL 1.7
PT. BANK SYARIAH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
PER 31 DESEMBER 20X1

Uraian	Jumlah
Sumber Dana Zakat	
Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx
Jumlah sumber dana zakat	xxx
Penggunaan Dana Zakat	
Fakir	xxx
Miskin	xxx
Amil	xxx
Muallaf	xxx
Orang yang terlilit utang (<i>gharim</i>)	xxx
<i>Riqab</i>	xxx
<i>Fisabilillah</i>	xxx
Orang yang dalam perjalanan (<i>ibnu sabil</i>)	xxx
Jumlah penggunaan dana zakat	xxx
Kenaikan (penurunan) dana zakat	xxx
Saldo awal dana zakat	xxx
Saldo akhir dana zakat	xxx

Sumber : Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK No.101

Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 juga terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang meliputi sumber dana selama suatu jangka waktu serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat ada di tabel 1.7.

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 juga terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam PSAK No. 101. Bentuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ada di tabel 1.8.

TABEL 1.8.
PT. BANK SYARI'AH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
PER 31 DESEMBER 20X1

Uraian	Jumlah
Sumber Dana kebajikan	
Infak zakat dari dalam bank syari'ah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	xxx
Saldo awal dana kebajikan	xxx
Saldo akhir dana kebajikan	xxx

Sumber : *Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah PSAK No.101*

9. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 menyajikan catatan atas laporan keuangan yang disajikan sesuai PSAK terkait.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangannya. Sehingga, penulis tidak perlu melakukan penyesuaian PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan PSAK No. 101. Perbedaan penyajian laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan PSAK 101 dikarenakan produk yang berbeda. Perbandingan antara laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan PSAK 101 (berdasarkan produknya) diuraikan sebagai berikut:

1. Neraca

1) Aktiva

Secara umum, bagian aktiva dari neraca PT. BPRS Bhakti Sumekar periode 2012 telah sesuai dengan PSAK No. 101 yaitu terdiri dari aktiva dan pasiva. Namun, pada penyajiannya masih ada perbedaan yaitu dalam pemberian nama akun. Hal itu, dikarenakan PT. BPRS Bhakti Sumekar memiliki produk yang sedikit berbeda dengan

penyajian laporan keuangan yang ada dalam PSAK No. 101. Elemen Aktiva yaitu terdiri dari akun kas, penempatan pada bank Indonesia, penempatan pada bank lain, piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ijarah, qardh, penyisihan aktiva produktif -/-, aktiva lain-lain. Sedangkan, berdasarkan PSAK No. 101 terdiri dari akun kas, penempatan pada bank, giro pada bank lain, investasi pada efek/surat berharga, piutang dan pembiayaan.

2) Kewajiban

Kewajiban pada neraca PT. BPRS Bhakti Sumekar terdiri dari akun kewajiban segera, tabungan wadiah, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban lain-lain, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dana investasi tidak terikat yang terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Akun-akun kewajiban PT. BPRS Bhakti Sumekar ini telah sesuai dengan PSAK No. 101. Namun, masih terdapat perbedaan dalam pemberian nama akun karena memiliki produk yang berbeda yaitu: bagi hasil yang belum dibagikan, kewajiban kepada bank lain, pembiayaan yang diterima, utang pajak, estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi, pinjaman yang diterima.

3) Ekuitas

Ekuitas pada neraca PT. BPRS Bhakti Sumekar periode 2012 terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, selisih penilaian kembali, cadangan dan saldo laba (rugi). Sedangkan dalam PSAK No. 101 terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor dan saldo laba (rugi).

2. Laporan Laba Rugi

Pendapatan dan beban adalah bagian dari laporan laba rugi. Pendapatan PT. BPRS Bhakti Sumekar terdiri dari pendapatan operasional, bagi hasil kepada pemilik dana, pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan operasional dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional dari penyaluran dana terdiri dari pendapatan dari pihak ketiga bukan bank, pendapatan dari bank Indonesia dan pendapatan dari bank lain. Sedangkan, bagi hasil kepada pemilik dana terdiri dari pihak ketiga bukan bank, Bank Indonesia dan Bank lainnya. Pihak ketiga bukan bank terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan lainnya. Pendapatan dalam PSAK No. 101 pendapatannya dibagi dalam dua nama akun. Pertama, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang termasuk didalamnya pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil dan pendapatan usaha utama lainnya. Kedua, adalah pendapatan nonusaha. Beban PT. BPRS Bhakti Sumekar terdiri dari beban operasional dan beban non operasional, ditambah zakat dan taksiran

pajak penghasilan. Beban operasional terdiri dari bonus titipan wadiah, beban administrasi dan umum, beban personalia, beban penyisihan penghapusan aktiva produktif dan lainnya. Sedangkan, beban berdasarkan PSAK No. 101 dibagi menjadi dua nama akun yang terdiri dari: pertama, beban usaha dan yang termasuk di dalamnya yaitu akun beban kepegawaian, beban administrasi, beban penyusutan dan amortisasi dan beban usaha lain. Akun kedua adalah beban nonusaha dan beban pajak.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

PT. BPRS Bhakti Sumekar telah menyusun dan menyajikan Laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangannya. Laporan perubahan ekuitas, yaitu rincian dari keseluruhan modal yang diinvestasikan oleh para investor (*mudharib*) pada saat akad kerjasama terjadi. Sedangkan, laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAK No. 101 yaitu bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu kepada PSAK terkait.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK terkait. Sedangkan, PSAK No. 101 menyatakan laporan arus kas harus disusun dengan mengacu pada PSAK terkait.

5. Laporan perubahan dana investasi terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK No.101.

6. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK No. 101.

7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK No. 101.

8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK 101. Salah satu penggunaan dana kebajikan PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah memberikan pinjaman lunak yang disebut *Qard* dan pinjaman kebajikan yang dikenal dengan *Al-Qardul Hasan*. Tugas utama lembaga ini adalah menggulirkan program-program yang berdaya guna dan bermanfaat bagi para penerima bantuan (*mustahikin*) terutama di kantong-kantong kemiskinan, daerah kritis dan bencana, dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pijakan dalam melangkah.

PT. BPRS Bhakti Sumekar telah melakukan CSR dengan baik. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan

semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan *kompetitor*. *CSR* merupakan konsep di mana PT. BPRS Bhakti Sumekar secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan PT. BPRS Bhakti Sumekar ini terus diupayakan agar sesuai dengan konsep dasar *CSR*, yaitu membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengusahakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat.

9. Catatan atas laporan keuangan

Laporan arus kas PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam penyajiannya telah mengacu dan menggunakan PSAK terkait. Sedangkan, PSAK No. 101 menyatakan laporan arus kas harus disusun dengan mengacu pada PSAK terkait.

Laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar telah menyusun neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga informasi keuangan yang disajikan PT. BPRS Bhakti Sumekar telah sesuai dengan PSAK No. 101. PSAK No. 101 penyajian laporan keuangan syariah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah menyajikan informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan yang sangat lengkap dan sesuai prinsip syariah.

Untuk penyesuaian pendapatan bagi hasil bisa dilihat dari laporan laba rugi. PT. BPRS Bhakti Sumekar memisahkan pendapatan menjadi tiga elemen yaitu yang berasal dari pendapatan operasional, pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan non operasional. Adapun uraian dari pendapatan yang ada di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasional Dibagi menjadi:

Pendapatan Operasional PT. BPRS Bhakti Sumekar disajikan dalam laporan laba rugi pada urutan pertama yang terdiri dari: pendapatan operasional setelah penyaluran dana yang terdiri dari (pendapatan pihak ketiga bukan bank, pendapatan dari bank Indonesia dan pendapatan dari bank lain) dan pendapatan operasional lainnya.

2. Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil

Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil disajikan dalam laporan laba rugi dengan urutan setelah Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana.

3. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional disajikan dalam laporan laba rugi dengan urutan setelah Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana.

4. Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana -/-

Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar disajikan dalam laporan laba rugi pada urutan kedua yang terdiri dari: pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari (tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan lainnya), Bank Indonesia dan Bank lainnya.

Adapun pelaksanaan akadnya dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar berupa akad mudharabah. Dari akad inilah PT. BPRS Bhakti Sumekar menerapkan sistem bagi hasil dalam bentuk prosentase. Besarnya prosentase ini diperoleh dari hasil kesepakatan bersama pada saat melakukan akad mudharabah. Adapun besarnya prosentase yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berdasarkan HI / 1000

Penetapan bagi hasil dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah).

Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$BagiHasilNasabah = \frac{Rata - RataDanaNasabah}{1000} \times HI - 1000 \times \frac{NisbahNasabah}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Suhaidi) menyimpan deposito Mudharabah di Bank BPRS Bhakti Sumekar pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Suhaidi adalah :

$$BagiHasilNasabah = \frac{Rp10.000.000,-}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = Rp. 54,650,-. Jadi jumlah bagi hasil tergantung pada besarnya keuntungan yang diperoleh. Pada saat PT. BPRS Bhakti Sumekar memperoleh keuntungan besar maka jumlah bagi hasilpun akan bertambah besar, begitu pula sebaliknya ketika pegadaian syari PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengalami kerugian maka kerugian itupun juga akan dibagi bersama.

Pengembangan produk PT. BPRS Bhakti Sumekar erat kaitannya dengan berbagai aspek hukum, terutama hukum bisnis di Indonesia. Akad wajib dibuat sesuai ketentuan PBI 7/46/PBI/2005.

PBI 7/46/PBI/2005 telah menetapkan syarat untuk berbagai produk perbankan syariah, baik berupa penghimpunan maupun penyaluran dana. Di bidang penghimpunan dana, telah diatur simpanan yang bersifat titipan, yakni: Giro Wadi'ah. Juga simpanan yang bersifat investasi, yakni: Giro Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

Dibidang penyaluran dana, PBI dimaksud telah mengatur di Bagian Kedua – Penyaluran Dana (Pasal 6 – 18 PBI7/46/PBI/2005): Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, dan Qardh.

Hal penting lainnya adalah berkenaan dengan agunan/jaminan. Pasal 8 UU 10/1998 menyatakan kewajiban bagi bank-dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji seksama oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha.

Agunan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan Undang-undang untuk diperjanjikan antara PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan nasabahnya dalam pembiayaan. Agunan sendiri ditetapkan menjadi 2 jenis, yang wajib serta agunan tambahan. Agunan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkenankan. Prinsip Rahn, dalam prakteknya biasa dipergunakan baik sebagai perjanjian untuk menggadaikan barang atau sebagai jaminan. Secara tradisional, pengecualian hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni: Mudharabah dan Musyarakah. Artinya untuk Mudharabah dan Musyarakah, jaminan bagi pengembalian modal merupakan hal yang tidak sah. Namun perkembangan di dalam praktek PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, dan telah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan, jaminan bagi Mudharabah dan Musyarakah pun diperkenankan. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan pada Ketetapan Pertama: Ketentuan pembiayaan butir 7:

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, PT. BPRS Bhakti Sumekar dapat meminta jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kemudian di Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah, menyatakan:

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o untuk mudharabah dan pasal 8 huruf o untuk musyarakah, menetapkan:

PT. BPRS Bhakti Sumekar dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana nasabah :

- 1) terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad
- 2) lalai dan/atau
- 3) curang

Khusus untuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, jaminan tidak berfungsi sebagai *Second Way-Out*, pengganti pengembalian modal yang ditanamkan PT. BPRS Bhakti Sumekar di usaha/proyek Nasabah. Tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan Nasabah. Faktor analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan Mudharabah/Musyarakah dengan pembiayaan lain terutama yang berbasis jual beli (Murabahah, Salam, Istishna') atau kredit. Murabahah atau kredit misalnya, bilamana pengembalian macet dengan alasan apapun, bank dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminan/agunan.

Berkenaan dengan penjaminan, terutama permasalahan administrasi pendaftaran serta pencatatan (*security attachment*), adalah sama sebagaimana penjaminan pada umumnya tidak boleh mengandung unsur Gharar, Maysir, Riba, Zalim, Riswah, serta Barang Haram & Maksiat. Aspek pertama yang mendapat kritikan keras dari konsep PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah konsep bunga sebagai dasar manfaat transaksi bank. Bunga dipandang tidak adil, mengingat ia menghilangkan keterkaitan antara untung rugi dengan resiko. Dalam konsep konvensional, Bank harus menanggung keuntungan nasabah penyimpan apapun yang terjadi dengan kinerja usahanya. Resiko kegagalan usaha yang menyebabkan bank merugi misalnya tidak dapat dijadikan rasio untuk tidak membayar bunga simpanan sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Dan sebaliknya nasabah debitur dengan kebutuhan apapun yang telah difasilitasi dengan kredit harus tetap membayar kewajiban bunga kepada bank, tanpa dapat mengemukakan alasan apapun berkenaan dengan resiko untung rugi bisnisnya.

Prinsip PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem PT. BPRS Bhakti Sumekar antara lain :

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 4) Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Dari hasil penelitian ini sudah jelas bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah menerapkan sistem pendapatan dan bagi hasil yang sesuai dengan PSAK No. 101, juga sesuai dengan ajaran syari’ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PSAK No. 101 sudah diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar. Hal ini terlihat telah lengkapnya laporan keuangan yang disusun oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode. PT. BPRS Bhakti Sumekar telah menyusun 9 (sembilan) laporan keuangan dari laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 101.
2. Kesesuaian antara pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan konsep-konsep yang diatur dalam *syariah* Islam.

Penelitian ini masih perlu disempurnakan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan penelitian ini misalnya dalam perlakuan akuntansinya (pengakuan dan penilaian) dalam laporan keuangan perbankan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Cooper dan William Emory. 1995. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Djarwanto. 2004. *Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Per 1 Oktober,. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Per 1 Juli,. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nur Indrianto dan Bambang Soepomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Donald E. Keiso and Jerry J. Weygant. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dwi Prastowo. 2005. *Analisis Laporan Keuangan. Akademi Manajemen*. Yogyakarta: Perusahaan YKPN.
- Ramdhani, Lestari. 2007. *Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana.
- Heri Sudarsono. 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi & Ilustrasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- www.bhaktisumekar.co.id